

DPR Panggil PBSI Terkait Gagal Tampilnya Atlet di All England

JAKARTA (IM) - Komisi X DPR akan memanggil Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dalam waktu dekat. Pemanggilan ini dalam rangka meminta keterangan PBSI ihwal peristiwa atlet Indonesia yang dipaksa mundur dari perhelatan All England 2021.

"Kita akan minta klarifikasi dan penjelasan dari pihak PBSI," kata Ketua Komisi X Saiful Huda, Jumat (19/3).

Kendati demikian, Huda menyampaikan bahwa rencana pemanggilan tersebut belum bisa dipastikan waktunya. Akan tetapi, ia menyebutkan akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

"Nunggu rapat internal komisi dulu. Semoga bisa secepatnya," ujar Politikus Partai Kebangkitan Bangsa

(PKB) itu.

Diberitakan sebelumnya, Semua pebulu tangkis Indonesia dipaksa mundur dari All England 2021. Pandemi Covid-19 menjadi penyebabnya. Semua terjadi karena skuat Indonesia berada dalam satu pesawat dengan penumpang yang dinyatakan positif Covid-19 saat terbang ke Inggris.

"Seluruh Tim Indonesia terpaksa harus mundur dari turnamen Yonex All England 2021 dan tidak dapat melanjutkan pertandingan. Hal ini dikarenakan, saat perberangkatan dari Istanbul ke Birmingham pada Sabtu (13/3) lalu, terdapat penumpang yang terkena Covid-19. Namun, kami pun tidak diberi tahu siapa, berapa orang, dan dari mana asal orang yang positif tersebut," tulis laman PBSI. ● mei

Konser Musik Diperbolehkan dengan Penonton 25 Persen

JAKARTA (IM) - Pemerintah sudah memperbolehkan kegiatan seni dan budaya, termasuk konser musik. Hanya saja kapasitas penonton yang diperbolehkan maksimal 25 persen.

"Diperkenankan (pelaksanaan konser musik) dengan prokes (protokol kesehatan) yang ketat. Dan lihat zonasi dari tiap-tiap daerah," kata Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Syafrizal, Jumat (19/3).

Syafrizal mengatakan, untuk zonasi mana saja yang boleh menggelar konser musik, akan ditentukan lebih lanjut oleh kepala daerah.

Adapun dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran

Covid-19, kegiatan seni dan budaya tidak diperkenankan dalam pelaksanaan PPKM mikro.

Pelaksanaan PPKM mikro akan diperpanjang kembali mulai tanggal 23 Maret hingga 5 April 2021.

Menurut Syafrizal, pelonggaran ini dilakukan agar para pekerja seni bisa membiasakan diri dengan adaptasi kebiasaan baru.

Selain memperlonggar ketentuan orang untuk kegiatan seni budaya, pemerintah memperluas daerah yang melaksanakan PPKM mikro.

Ada lima provinsi tambahan yang melaksanakan aturan tersebut. Kelima provinsi tersebut adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Syafrizal mengatakan, lima daerah itu telah memasuki salah satu kriteria indikator pelaksanaan PPKM. ● mei

2 Polhukam

IDN/ANTARA



PERGANTIAN IDENTITAS APRILIA MANGANANG DIKABULKAN

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri) menerima salam dari prajurit TNI AD Serda Aprilio Perkasa Manganang (kanan) usai mengikuti sidang pergantian jenis kelamin dan penggantian nama secara virtual Pengadilan Negeri Tondano, Sulawesi Utara, di Markas Besar TNI Angkatan Darat, di Jakarta, Jumat (19/3). Pengadilan Negeri Tondano, Sulawesi Utara menanggapi permohonan pergantian identitas Serda (K) Aprilio Manganang menjadi laki-laki yakni Serda Aprilio Perkasa Manganang.

Rizieq Shihab Tak Punya Alasan Menolak Sidang Secara Online

Sikap Rizieq Shihab menolak sidang online dipertanyakan. Sebab, sidang yang digelar secara offline di masa pandemi justru berpotensi menimbulkan kerumunan.

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, tidak ada alasan bagi Rizieq Shihab untuk menolak menghadiri sidang secara online atas kasus yang tengah diadikannya.

Pasalnya, ia menilai, pelaksanaan sidang, baik secara online maupun offline, merupakan wewenang pengadilan untuk memutuskannya.

"Keputusan sidang online atau offline, itu kan merupakan keputusan resmi yang jelas ada dasar pertimbangannya. Jadi, tidak ada alasan untuk men-

olak hal ini tidak sah," kata Sahroni, Jumat (19/3).

Selain itu, politikus Partai Nasdem itu mengatakan, substansi sidang tidak berkurang meskipun sidang dilangsungkan secara online. Hal ini dikarenakan dalam persidangan juga dihadiri oleh hakim, jaksa, terdakwa dan penasihat hukum.

Sementara itu, kata dia, apabila sidang digelar secara offline justru akan dihidari oleh pendukung atau simpatisannya.

"Padahal, pendukung atau

penonton sidang bukan merupakan bagian yang penting dalam persidangan," ucapnya.

Untuk itu, ia mempertanyakan sikap Rizieq Shihab yang menolak persidangan online dan meminta dilakukan secara offline. Sebab, menurutnya sidang yang digelar secara offline di masa pandemi akan berpotensi menimbulkan kerumunan. Ia berpandangan, apabila sidang digelar secara offline dan menimbulkan kerumunan, justru akan semakin memperberat Rizieq Shihab dalam kasusnya.

"Sidang offline bisa berpotensi melanggar protokol kesehatan. Masa sidang untuk pelanggaran protokol kesehatan, malah melanggar prokes?," kata Sahroni dengannya bertanya.

Untuk itu, Sahroni berpendapat sebaiknya Rizieq mengikuti aturan persidangan

yang telah ditentukan. Hal tersebut, menurutnya perlu dilakukan Rizieq jika tidak ingin merugikan diri sendiri dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan. "Ikuti saja sesuai aturan yang ada. Jika tidak ingin rugi buat diri sendiri," katanya.

Diberitakan, terdakwa kasus kerumunan di Petamburan, Megamendung, dan kasus tes usap RS Ummi Bogor Rizieq Shihab, menolak menghadiri persidangan yang diselenggarakan secara online.

Rizieq juga menegaskan tak akan pernah menghadiri sidang yang diselenggarakan secara online hingga vonis terhadap dirinya dibacakan.

"Sidang yang lalu saya sudah sampaikan saya tak bersedia secara online. Silakan majelis hakim bersama jaksa lanjutkan saja sidang sampai vonis tanpa kehadiran saya," katanya, sebagaimana ditayangkan dalam kanal YouTube PN Jakarta Timur, Jumat (19/3). ● mei

KPK Sita Dokumen Terkait Suap Bansos Covid-19 dari Istri Penyupai Juliari Batubara

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen penting yang diduga berkaitan dengan suap pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek dari dua saksi.

Kedua saksi, Istri tersangka Ardian Iskandar Maddanatja, Indah Budi Safitri dan terduga operator Ihsan Yunus, Agustri Yogasmaria (Yogas), diperiksa penyidik KPK pada Kamis (18/3) malam.

Ardian Iskandar sendiri merupakan tersangka penyupai Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. Sedangkan Ihsan Yunus merupakan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP.

"Agustri Yogasmaria dan Indah Budi Safitri, dari keduanya, tim penyidik KPK melakukan penitayan berbagai barang bukti diantaranya barang elektronik dan dokumen yang terkait dengan perkara ini," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (19/3).

Sejauh ini, KPK baru menetapkan mantan Mensos

Juliari Peter Batubara dan empat tersangka lainnya sebagai tersangka suap terkait program bantuan sosial penanganan virus corona (Covid-19) di wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Keempat tersangka lainnya dalam kasus ini adalah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian Iskandar M dan Harry Van Sidabukke selaku pihak swasta.

KPK menduga, berdasarkan temuan awal, Juliari menerima Rp10 ribu per paket sembako dengan harga Rp300 ribu. Namun menurut KPK, tak tertutup kemungkinan Juliari menerima lebih dari Rp10 ribu. Total uang yang sudah diterima Juliari Rp 17 miliar.

KPK juga menduga Juliari menggunakan uang suap tersebut untuk keperluan pribadinya, seperti menyewa pesawat jet pribadi. Selain itu, uang suap tersebut juga diduga dipergunakan untuk biaya pemenangan kepala daerah dalam Pilkada serentak 2020. ● han

Pencuri 21 Ton Solar di Perairan Tuban Ternyata Mantan Pekerja Pertamina

JAKARTA (IM) - Salah satu pelaku pencurian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar milik PT. Pertamina di perairan Tuban, Jawa Timur, ternyata mantan pekerja perusahaan tersebut.

Pelaku bernama Johnle telah berhenti bekerja di PT Pertamina sejak tiga tahun lalu. Hal itu dikatakan Dirpolair Korpolarud Baharkam Polri, Brigjen Yassin Kosasih dalam jumpa pers di Baharkam Polri, Jakarta Utara, Jumat (19/3).

"Salah satu tersangka ini adalah mantan dari mekanik yang pernah bekerja di SPM tersebut, sehingga yang bersangkutan sangat tahu bagaimana cara kerja di SPM," kata Yassin.

Tim gabungan Ditpolair Korpolarud Baharkam Polri diketahui telah mengagalkan upaya pencurian yang dilakukan enam orang tersangka di single point morning (SPM) atau tempat bongkar muat BBM tengah laut di Tuban.

Dua orang tersangka yang ditangkap, yakni Ismail Ali (47) yang merupakan nahkoda kapal dan Muhammad Taufik (39). Sementara tersangka lain, yakni Johnle sang mantan mekanik, Mudi, Kartawo dan Hartono melarikan diri dengan cara melompat ke laut saat penangkapan.

Ps Kasubdit Gakkum Ditpolair Korpolarud Baharkam Polri AKBP Yuldi Yusman

menjelaskan, para tersangka mencuri solar dengan memodifikasi tutup pipa atau hose yang disambungkan ke pipa besar. Pipa itu mengalirkan BBM dari SPM ke tangki darat PT Pertamina.

"Pada saat kapal tanker Pertamina mengisi pipa bawah laut, kemudian akan ada sisa dari pada proses pemindahan itu, sisa inilah yang kemudian oleh para pelaku dicuri," jelas Yuldi.

"Caranya dengan memasang satu pipa yang sudah dimodifikasi oleh pelaku kemudian pipa itu disambungkan dengan pipa yang ada di SPM," lanjutnya.

Yassin menambahkan, modifikasi itulah yang dilakukan oleh Johnle berdasarkan pengalamannya bekerja untuk memperoleh keuntungan.

"Sehingga pada saat petugas lengah dibuat alat hose ini sesuai dengan apa yang mereka dapati selama bekerja di sana, ini lah diganti yang aslinya, diganti oleh mantan pegawai kontrak ini Johnle ini," tambah Yassin.

Dari penangkapan itu, di-



KPK TERIMA PENYERAHAN 13 UNIT SEPEDA Petugas mengamankan sejumlah unit sepeda yang dibeli oleh tersangka kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster Syafrizal di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/3). Sepeda-sepeda tersebut diduga dibeli menggunakan uang dari para eksportir yang mendapatkan izin ekspor benih lobster.

KPK Sita 13 Sepeda Road Bike Terkait Kasus Suap Edhy Prabowo

JAKARTA (IM) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 13 unit sepeda jenis road bike terkait kasus suap ekspor benur lobster yang melibatkan mantan Menteri KKP Edhy Prabowo, Jumat (19/3).

Pantauan di KPK pada Jumat siang, belasan sepeda tersebut dibawa dengan menggunakan dua mobil berwarna putih. Kemudian seua sepeda tersebut dipajang di depan lobi gedung antirasuah.

Sepeda tersebut diserahkan ke KPK melalui perwakilan dari tersangka Safri (SAF), staf khusus Edhy Prabowo, yang juga sudah berstatus tersangka.

"Hari ini (19/3), tim penyidik KPK menerima penyerahan sepeda sebanyak 13 unit berbagai merek dari pihak yang mewakili tersangka SAF," ujar Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Pembelian sepeda tersebut diduga dilakukan oleh tersangka Safri dengan uang yang berasal dari para eksportir yang mendapatkan izin ekspor benih lobster di KKP tahun 2020.

"Pembelian sepeda tersebut diduga untuk kepentingan tersangka EP (Edhy Prabowo) selaku menteri KKP saat itu," ungkap Ali.

Berikutnya, kata Ali, pihaknya akan melakukan analisa untuk segera dilaku-



PPKM Mikro Diperluas Jadi 15 Provinsi

JAKARTA (IM) - Pemerintah memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro selama 14 hari yakni 23 Maret-5 April 2021. Selain itu, pemerintah juga memperluas cakupan kebijakan tersebut menjadi 15 provinsi.

"(Cakupan PPKM mikro) menjadi 15 daerah," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring, Jumat (19/3).

Semula, terdapat 10 provinsi yang menerapkan PPKM mikro yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Kini, ada 15 provinsi yang menerapkan pembatasan tersebut dengan tambahan provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Sama seperti PPKM mikro periode sebelumnya, kata Airlangga, terdapat 4 parameter yang digunakan untuk menerapkan pembatasan di suatu wilayah. Keempatnya yakni kasus aktif di atas rata-rata na-

sional, kesembuhan di bawah rerata nasional, tingkat kematian di atas rata-rata nasional, dan tingkat keterisian rumah sakit atau ruang isolasi pasien Covid-19 di atas 70 persen.

Airlangga menjelaskan, pembatasan yang diterapkan selama PPKM mikro jilid 4 hampir sama dengan PPKM periode sebelumnya. Aturan tersebut berupa pembatasan kegiatan perkantoran atau work from office (WFO) sebesar 50 persen, dine in atau makan di restoran dibatasi 50 persen dengan membolehkan layanan pesan antar, dan fasilitas umum dibatasi maksimal 50 persen.

Kemudian, pusat perbelanjaan atau mal beroperasi hingga pukul 21.00, dan sektor esensial serta konstruksi beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan.

Bedanya, pada PPKM mikro jilid 4 ini pemerintah mulai mengizinkan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara tatap muka.

Namun, metode ini diperuntukkan bagi perguruan tinggi atau akademik.

Kegiatan tatap muka dilakukan secara bertahap dengan proyek percontohan dan menerapkan protokol kesehatan.



ALIH KODAL LANUD ISKANDAR MASUK JAJARAN KOOPSAU I Pangkoopsau I Marsda TNI Tedi Rizalhiadi memimpin prosesi alih Kodal (Komando dan Pengendalian) dan Administrasi Lanud Jenderal Besar Soedirman Purbalingga dan Administrasi Lanud Pangkalan Bun Kota Waringin Barat, di Gedung Roesmin Nurjadin Koopsau I, Jakarta, Jumat (19/3). Peralihan Kodal dan Administrasi Lanud Jenderal Besar Soedirman dan Lanud Iskandar merupakan tindak lanjut dari Instruksi Kasau nomor Ins/2/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang pelaksanaan penataan kedudukan Lanud Jenderal Besar Soedirman dan Lanud Iskandar.